

Daya Dukung Lingkungan Menurun

: Sejumlah perusahaan sawit Indonesia mendapat sorotan dunia lantaran mengabaikan aspek lingkungan.

Sebanyak 20 perwakilan lembaga swadaya masyarakat (LSM) se-Kalimantan Barat (Kalbar) meminta semua pihak agar mendorong laju pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan melindungi ketersediaan sumber-sumber pangan dan air. Sejauh ini, investasi yang bergulir di sektor perkebunan kelapa sawit hanya memicu melemahnya daya dukung lingkungan.

Permintaan itu mencuat dalam sebuah pertemuan antara koalisi masyarakat sipil Kalbar dengan Menteri Urusan Eropa dan Kerja Sama Pembangunan Belanda, Ben Knapen, di Kantor WWF-Indonesia Program Kalbar, di Pontianak, Rabu (6/7) sore. Dalam pertemuan selama dua jam yang dipimpin Manajer WWF-Indonesia Program Kalbar Hermayani Putera, diungkap pula sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kalbar yang mendapat sorotan dunia lantaran mengabaikan regulasi yang diterapkan pemerintah Indonesia. Di antaranya, kasus Golden Agri Resource (Sinar Mas Grup) di Ketapang dan Kapuas Hulu, kasus Wilmar International dan Duta Palma di Sambas, serta IOI di Ketapang.

Direktur Eksekutif Lembaga Gemawan, Laili Khairnur yang tampil sebagai juru bicara menyebut, rentetan kasus di atas merupakan puncak gunung es dari aktivitas ilegal di Kalbar. "Pelanggaran itu umumnya termasuk *illegal logging*. Mereka membersihkan lahan tanpa izin, tanpa dokumen Amdal, dan *land grabbing* tanpa kesepakatan dengan masyarakat," jelasnya.

Laili menjelaskan, konsekuensi dari kebijakan ini menyebabkan hutan dan tanah yang dikelola masyarakat (tembawang) juga diambil untuk pengembangan perkebunan. Hasilnya, muncullah konflik horizontal yang kian meningkat dan meluas.

"Sejak 2004 silam, konflik di Kalbar meningkat tajam. Sebelumnya tercatat hanya 26 konflik. Lalu kini meningkat tajam menjadi 104 konflik di delapan kabupaten. Sekitar 70 masyarakat kampung dan aktivis telah ditangkap dalam beberapa tahun terakhir, dengan tuduhan menghalangi ekspansi perkebunan sawit," papar Laili.

Dibeberkan pula, hasil penelitian terbaru WWF dan Sarvision, tingkat deforestasi di Kalbar telah mencapai 916 ribu hektare selama periode 2004-2008. Dan, perkebunan kelapa sawit menjadi penyebab utama hilangnya hutan di provinsi dengan luas wilayah 14,6 juta hektare atau 3,3 kali luas negeri Belanda ini.

Menyikapi sejumlah persoalan pembangunan di Kalbar, Menteri Urusan Eropa dan Kerja Sama Pembangunan Belanda, Ben Knapen, berjanji akan mendorong program pembangunan berkelanjutan itu di berbagai sektor, baik perdagangan, pertanian, dan perikanan. "Kami juga akan perhatikan peningkatan kapasitas masyarakat," ujarnya.

Knapen juga menyoroti banyaknya areal hutan di Kalbar yang ditebang untuk kepentingan perkebunan dan pertambangan. "Kami tahu banyak kerusakan hutan terjadi, tapi Pemerintah Belanda tidak punya kewenangan untuk menghentikan investasi. Kita hanya bisa bantu mendorong bagaimana supaya pembangunan ekonomi dapat seimbang dengan pemeliharaan alam dan lingkungan," tandasnya.